

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi pengaturan perlindungan hukum dan bentuk perlindungan hukum peserta jaminan kesehatan penerima bantuan iuran dalam struktur peraturan perundang-undangan Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), pendekatan analitis (*Analytical Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah inventarisasi hukum dan sinkronisasi hukum. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumenter.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai perlindungan hukum peserta jaminan kesehatan penerima bantuan iuran dalam struktur peraturan perundang-undangan Indonesia telah menunjukkan taraf sinkronisasi. Artinya, bahwa peraturan yang lebih rendah derajatnya telah sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya dan peraturan yang lebih tinggi derajatnya menjadi dasar pembentukan peraturan yang lebih rendah. Bentuk perlindungan hukum peserta jaminan kesehatan penerima bantuan iuran pada struktur peraturan perundang-undangan di Indonesia meliputi jaminan pengaturan mendapatkan nomor identitas tunggal peserta, jaminan pengaturan memperoleh manfaat pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, jaminan pengaturan memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai yang diinginkan, jaminan pengaturan mendapatkan informasi mengenai hak dan kewajiban serta prosedur untuk mendapatkan hak dan memenuhi kewajiban, jaminan pengaturan memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan jaminan pengaturan memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.

***Kata kunci*** : *Perlindungan Hukum, Peserta Jaminan Kesehatan Nasional, Penerima Bantuan Iuran, Pelayanan Kesehatan.*

## **ABSTRACT**

*This research aims to observe the synchronization between the legislations of legal protection and the forms of protection for the participants of health insurance as the receivers of medical assistance contribution in legal framework of Indonesian legislations.*

*This type of research is Normative Legal Research. It employs descriptive qualitative method with several approaches. Those are Statue Approach, Analytical Approach, and Conceptual Approach. The research specification used are the legal inventory and the legal synchronization. The type of data in this research is the secondary data that were obtained from a study literature review and study documentaries.*

*Based on the results of this research, it can be concluded that the legislations of legal protection for the participants of health insurance as the receivers of medical assistance contribution in legal framework of Indonesian legislations have shown the level of synchronization. It means that the lower level legislations have been convenient with the higher level legislations and the higher level legislations have become the formulation of lower level legislations. The forms of legal protection for the participants of health insurance as the receivers of medical assistance contribution in legal framework of Indonesian legislations include the regulatory guarantee to obtain the single identity number for each participant, the regulatory guarantee to obtain the benefits of health services in every health facilities which is collaborated with Social Insurance Administration Organization, the regulatory guarantee to select the desirable first-level health facility which is collaborated with Social Insurance Administration Organization, the regulatory guarantee to obtain information and to complain about the health services within National Health Insurance, arranged guarantee for obtaining rights and obligations information as well as procedures for obtaining rights and fulfilling obligations, arranged guarantee for gaining access to health sector resources and arranged guarantee for obtaining information about health data including medical actions and treatments that have been and will be received from health workers.*

**Keywords:** *Legal Protection, The Participants of National Health Insurance, The Receivers of Medical Assistance Contribution, Health Services.*